

The background is a solid green color with a pattern of palm leaves visible at the top, bottom, and right edges. The text is white and centered.

# **POLICY BRIEF**

**Direktorat Jenderal Planologi  
Kehutanan dan Tata Lingkungan  
2021**

# **POLICY BRIEF DITJEN PKTL**

## **Pengarusutamaan Gender dalam Upaya Mewujudkan Pemantapan Kawasan Hutan dan Penataan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan**

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Komitmen Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) dalam mengintegrasikan gender dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam memperoleh akses dan manfaat pembangunan nasional, khususnya pemantapan Kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan tertuang di dalam RENSTRA Ditjen PKTL Tahun 2020-2024, didukung dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pembentukan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender. Dukungan yang diberikan oleh Ditjen PKTL berfokus pada kegiatan penataan batas kawasan hutan, dan kegiatan inventarisasi sumber daya hutan. Bahkan di tingkat tapak, Ditjen PKTL secara aktif mendorong perempuan turut serta dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengintegrasian gender, baik dengan sosialisasi maupun diajak turun langsung menangani masalah yang ada di lapangan. Selain mengajak masyarakat turut aktif dalam pelaksanaan pengintegrasian gender, Ditjen PKTL juga bekerjasama dengan Kalimantan Forest Project (KALFOR) untuk mendorong dan meningkatkan sensitivitas gender di Ditjen PKTL. Pada tahun 2020 upaya Ditjen PKTL mengimplementasikan PUG mendapatkan penghargaan tingkat Madya Lomba PUG unit Eselon I KLHK. Policy brief ini memuat tentang implementasi PUG, serta inovasi dan strategi Ditjen PKTL dalam pelaksanaan PUG, guna mewujudkan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

# Pendahuluan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa tantangan yang harus dijawab Ditjen PKTL yaitu kebutuhan terhadap lahan dan penggunaan Kawasan hutan yang terus meningkat namun kualitas lingkungan cenderung menurun (daya dukung dan daya tampung) yang berpengaruh pada pembangunan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan, maka perlu adanya strategi yang tepat dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi Ditjen PKTL ke depan sehingga dapat menjawab tantangan internal dan eksternal dalam lima tahun mendatang. Skenario tersebut diarahkan untuk memperbaiki peranan Ditjen PKTL terutama dalam mewujudkan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan.

Selain itu, untuk mendukung implementasi PUG di lingkungan KLHK, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memilih untuk berkomitmen untuk berperan aktif dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam memperoleh akses dan manfaat pembangunan nasional, khususnya pembangunan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan gender dalam setiap program maupun kegiatan yang dilakukan.

Ditjen PKTL telah memiliki Roadmap Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021-2025 untuk menyediakan instrumen sebagai acuan pelaksanaan PUG di lingkungan Ditjen PKTL sehingga implementasi PUG dapat terlaksana dengan optimal dan berkelanjutan dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

## Implementasi PUG Ditjen PKTL

Dalam perjalanan pembangunan PUG di KLHK, Ditjen PKTL turut berperan dalam upaya integrasi dan implementasi pengarusutamaan gender pada program dan kegiatan Ditjen PKTL dan mendukung program dan kegiatan PUG yang dilaksanakan oleh Pokja PUG KLHK. Pada tahun 2020 Ditjen PKTL mendapatkan penghargaan ditingkat “Madya” pada Lomba PUG Eselon I PUG KLHK. Pada tahun 2021 Ditjen PKTL juga turut berpartisipasi untuk mensukseskan rangkaian kegiatan Festival Gender KLHK, diantaranya Lomba Video Story Telling PUG, TEACH dan GLEADS.

Pencapaian PUG Ditjen PKTL yaitu pada pemenuhan tujuh komponen Kunci Prasyarat PUG dan pencapaian pelaksanaan tujuh komponen kunci pelaksanaan PUG sebagai berikut :

## 1. Komitmen

Pelaksanaan komitmen PUG Ditjen PKTL sebagaimana tertuang dalam Renstra Ditjen PKTL 2020-2024 terkait Pengarusutamaan dinyatakan bahwa Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Strategi yang dibangun antara lain: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. Peran Ditjen PKTL mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kegiatan kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penetapan Kawasan Hutan serta dalam kegiatan inventarisasi sumber daya hutan di wilayah BPKH. Bukti pelaksanaan atas strategi tersebut antara lain telah diberikan tanda (*tagging*) dalam aplikasi KRISNA dan sesuai dengan arah kebijakan PUG, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mencermati pembagian kerja yang menghasilkan indikator peningkatan jumlah pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian penetapan kawasan hutan serta inventarisasi sumber daya hutan di BPKH.

Ditjen PKTL telah memiliki Roadmap PUG Tahun 2021-2025 yang merupakan salah satu bentuk komitmen lain dalam upaya mengintegrasikan PUG ke dalam program dan kegiatan bidang PKTL. Komitmen ini menjadi dasar dalam pelaksanaan integrasi perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam tugas, pokok, dan fungsi Ditjen PKTL.

## 2. Kebijakan

Berbagai macam kebijakan responsif gender pada Ditjen PKTL diharapkan dapat menjawab permasalahan kesenjangan gender baik dilingkungan Ditjen PKTL maupun di lingkungan masyarakat antara lain:

- a. Dokumen perencanaan responsif gender yaitu Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024, RENJA Ditjen PKTL Tahun 2020 dan RENJA Ditjen PKTL Tahun 2021.

- b. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender telah diberikan tanda (*tagging*) dalam aplikasi KRISNA dan sesuai dengan arah kebijakan PUG, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mencermati pembagian kerja yang menghasilkan indikator peningkatan jumlah pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan serta inventarisasi sumber daya hutan di BPKH.
- c. Ditjen PKTL setiap tahun telah Menyusun dokumen pendukung ARG yaitu *Gender Analysis Pathway (GAP)*, *Gender Budget Statement (GBS)* dan *Term Of References* terhadap kegiatan yang di *tagging* anggaran responsif gender.

### 3. Kelembagaan

Ditjen PKTL telah membentuk Sub Pokja PUG Ditjen PKTL yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: SK.29/PKTL/Setdit/Kum.1/6/2016 tentang Pembentukan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, kemudian pada tahun 2021 dilakukan penyegaran kepengurusan kelembagaan Sub Pokja PUG Ditjen PKTL yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: SK.22/PKTL/SET.2/KUM.1/5/2021 tentang Pembentukan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Sejak tahun 2018 juga telah dibentuk pada kelembagaan PUG UPT BPKH Wilayah I-XXII melalui pembentukan Sub Pokja PUG BPKH yang disahkan oleh masing-masing Kepala BPKH.

### 4. Sumber Daya

Saat ini SDM Ditjen PKTL yang telah terlatih PPRG pada Satker Pusat adalah sebanyak 20 orang, sedangkan untuk Satker UPT BPKH wilayah I-XXII telah memiliki masing-masing SDM yang telah terlatih PPRG sekurang-kurangnya 2 orang per Satker. Selain itu Ditjen PKTL juga memiliki 2 orang fasilitator sebagai penghubung dengan Pokja KLHK dan juga masing-masing fasilitator di masing-masing UPT BPKH. Selanjutnya Ditjen PKTL telah memiliki 3 orang *gender champion* yang berkomitmen besar dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Ditjen PKTL memiliki fasilitasi ruang laktasi untuk pegawai perempuan yang menyusui pada Satker Pusat yang terdapat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I lantai 8. Disamping itu masing-masing UPT BPKH juga menyiapkan sarana dan prasarana responsif gender seperti, ruang laktasi, ruang bermain anak, sarana beribadah yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, stiker anak-anak dilarang bermain pada lokasi berbahaya dan stiker dahulukan lansia dan kaum difabel, dan ruang serbaguna karyawati.



Terkait sumberdaya pendanaan dialokasikan untuk merespon kesenjangan gender bidang PKTL atau anggaran responsif gender (ARG), Ditjen PKTL telah mengalokasikan sebagaimana yang tertuang dalam GBS.

## 5. Data Terpilah

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui aplikasi Simpeg telah membangun penyediaan data terpilah jumlah pegawai menurut jenis kelamin, jabatan, golongan, pendidikan, dan pelatihan secara kuantitatif.

Ditjen PKTL pada Tahun 2021 telah mengagendakan untuk membangun Aplikasi Data Terpilah dalam rangka mendukung penyediaan data dan informasi secara vertikal terhadap perkembangan komposisi pegawai Ditjen PKTL dan keterlibatan masyarakat (eksternal) berdasarkan jenis kelamin dalam kegiatan Bidang PKTL, sehingga dapat dilakukan analisis gender terhadap perolehan akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap pembangunan bidang PKTL.

## 6. Alat/Tools

Ditjen PKTL telah menyediakan menyediakan Materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang responsif gender (poster, leaflet, banner, dan melalui sosial media). Data dan informasi terkait Implentasi PUG juga dapat di akses melalui website [www.pctl.menlhk.go.id](http://www.pctl.menlhk.go.id). Selain itu juga telah dilakukan sosialisasi yang diberikan pada pejabat struktural Ditjen PKTL sehingga dapat meningkatkan komitmen tentang pentingnya PUG di setiap program dan kegiatan, , peningkatkan kapasitas SDM Ditjen PKTL melalui PUG dan teknik fasilitasi PUG.

## 7. Peran Serta Masyarakat

Dalam rangka pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan Reguler dan Penataan Batas Kawasan Hutan untuk penyelesaian TORA, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melibatkan masyarakat setempat sebagai buruh, hal ini merupakan salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam pembangunan bidang PKTL. Selanjutnya Pendataan Sosial Budaya Masyarakat dilakukan melalui Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Objek TORA dan Pemberian Akses bagi masyarakat marginal calon penerima TORA.

Ditjen PKTL melalui Kerjasama dengan Kalimantan Forest Project telah menetapkan 3 komponen outcome strategis gender pada kegiatan Kalfor yaitu : 1) Mekanisme insentif untuk menjaga keanekaragaman hayati hutan diluar Kawasan dengan melakukan pendampingan peningkatan kapasitas, pelatihan dan studi banding terhadap kelompok masyarakat binaan seperti kelompok Wanita tenun ikat pada Desa Ensaid Panjang dengan memberikan pelatihan diversifikasi hasil tenun berupa aneka produk kerajinan dan lain-lain, 2) pembuatan Imun Booster pada kelompok masyarakat Kutai Timur dan pembinaan kelompok petani madu kelulut dan pengolahan buah cempedak di kabupaten Kota Waringin Barat. 3) selain itu juga Kalfor juga melakukan pembinaan *Gender Champion* di tingkat masyarakat sebagai penggerak untuk meneruskan kegiatan apabila dukungan dan pendampingan dari Project sudah selesai. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan menegaskan bahwa peran masyarakat perempuan dalam pembangunan ekonomi sangat besar.

## Tantangan dan Isu Gender Ditjen PKTL

1. Komitmen yang tertuang dalam Renstra belum dapat diimplementasikan secara efektif karena belum dijabarkan dalam bentuk-bentuk yang operasional yang mengakibatkan tidak akan dapat memunculkan dampak pada keadilan dan kesetaraan gender jika tidak dioperasionalkan.
2. Kebijakan Bidang PKTL masih banyak yang masih bersifat netral gender. Hal tersebut disebabkan karena perspektif gender yang belum seluruhnya diintegrasikan ke dalam aturan-aturan teknis maupun kebijakan yang bersifat umum.
3. Minimnya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Sub Pokja PUG sebagai upaya mendukung pelaksanaan kegiatan pengarus utamaan gender.
4. SDM Ditjen PKTL yang sensitif dan responsif gender masih sangat terbatas, fasilitas pendukung sebagai sarana dan prasarana responsif gender belum tersedia secara menyeluruh pada Satker lingkup Ditjen PKTL serta anggaran responsif gender telah tersedia meskipun masih terbatas pada beberapa kegiatan saja.
5. Pembangunan sistem data terpilah belum efektif mengakomodir kebutuhan analisis gender agar dapat dilakukan sampai dari level pusat sampai dengan level masyarakat.
6. Tools atau alat pendukung pelaksanaan PUG Ditjen PKTL sudah tersedia namun masih sangat terbatas dan belum memadai.

7. Peran serta masyarakat dalam kegiatan bidang PKTL belum terdokumentasikan dengan baik sehingga analisis gender untuk menghitung efektifitas pembangunan bidang PKTL untuk masyarakat belum dapat dilaksanakan, dan nilai Indeks Pembangunan Manusia (mikro dan makro dimana makro adalah komunitas atau masyarakat), Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Kinerja Gender dan Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam pembangunan bidang PKTL belum tersedia.

## **Inovasi dan Strategi Pengintegrasian Gender Ditjen PKTL**

Sebagai bentuk tanggung jawab dan kesungguhan dalam melaksanakan dan mengintegrasikan gender dalam kegiatan, Ditjen PKTL turut berinovasi agar pengintegrasian gender dalam program dan kegiatan, baik di pusat maupun di tapak menjadi lebih maksimal, melalui :

- Pembahasan terkait perumusan *gender action plan* dan menjabarkan komitmen PUG pada renstra kedalam bentuk yang lebih operasional
- Melakukan integrasi gender dalam regulasi/kebijakan
- Penguatan kapasitas kelembagaan pokja PUG dan gender focal point
- Integrasi konsep gender pada pelatihan, bimtek peningkatan kapasitas SDM
- Membangun sistem data terpilah sampai ke tingkat masyarakat
- Penyusunan Alat/ Tools pendukung implementasi PUG
- Peningkatan kapasitas SDM terkait pengelolaan pendokumentasian peran serta masyarakat

Ditjen PKTL juga memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk dapat menyelesaikan isu-isu gender yang ditemukan ditapak antara lain :

- Kegiatan di tingkat tapak telah mempertimbangkan akses dan partisipasi baik perempuan maupun laki-laki dan kaum difable.
- Terdapat gender quota terkait keterlibatan perempuan dan kelompok marjinal dalam kegiatan yang diselenggarakan di tingkat tapak
- Kebijakan/ aturan dan format data terpilah untuk setiap kegiatan dan kelompok sasaran/ penerima manfaat dari kegiatan yang dilakukan



- Ada kegiatan/ upaya peningkatan kapasitas bagi staf terkait dengan gender
- Keberadaan gender focal point/ gender officer di organisasi tingkat tapak
- Monitoring dan pelaporan terhadap indikator dan aspek gender dari kegiatan di tingkat tapak
- Keterlibatan stakeholders termasuk perempuan dan kelompok marjinal, dalam perencanaan, pelaksanaan dan money kegiatan di tingkat tapak
- Dukungan untuk kepemimpinan perempuan dalam kegiatan/ kelembagaan di tingkat tapak
- Peningkatan kapasitas terhadap perempuan dan kelompok marjinal
- Data terpilah dalam keterlibatan stakeholders di berbagai kegiatan di tingkat tapak

*Dilihat dari implementasi PUG dalam kegiatan, isu-isu yang dijumpai oleh PKTL, inovasi dan strategi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa kondisi dan situasi yang dihadapi oleh PKTL terutama di tapak, cukup berat. Misal, kegiatan pantauan tapal batas, dimana ketua kelompok koordinasinya adalah perempuan. Pantauan tapal batas merupakan kegiatan yang cukup berat, karena kelompok harus melakukan pantauan dan perjalanan di hutan menyusuri jejak tapal selama sehari-hari. Perempuan yang awalnya diragukan mampu untuk melaksanakan tugas, ternyata dengan baik dapat melakukan tugas tersebut. Keraguan muncul karena perempuan akan lama meninggalkan keluarga, sehingga dirasa tidak mungkin untuk mengemban tugas menyusuri tapal batas tersebut. Dibutuhkan dedikasi tinggi untuk melakukan kegiatan tersebut. Perempuan membuktikan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan teliti. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa, meskipun dalam kondisi dan situasi yang dihadapi cukup berat, namun PKTL berusaha untuk tetap terus melibatkan partisipasi perempuan di tapak untuk ikut berkontribusi dalam melakukan kegiatan-kegiatan kaitannya dengan PUG.*

## Penutup

Implementasi PUG dalam mewujudkan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Ditjen PKTL telah mendapatkan penghargaan tingkat madya dalam Lomba Implementasi PUG Lingkup Eselon I KLHK. Meski demikian Ditjen PKTL terus melakukan upaya pengarusutamaan gender agar pelaksanaan PUG bisa lebih berkelanjutan, yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan dan sensitivitas gender, khususnya tim Ditjen PKTL yang bekerja di lapangan, terutama agar mampu melakukan analisis gender di tingkat tapak.
2. Memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan memberikan kepercayaan lebih tinggi kepada perempuan untuk terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan Ditjen PKTL.
3. Melakukan pemberdayaan tidak hanya kaitannya dengan jenis kelamin, namun juga pemberdayaan berdasarkan kelompok umur, sehingga regenerasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan tapak akan terus berjalan berkelanjutan.

## Referensi

1. Ditjen PKTL. (2020). *Panduan Implementasi Strategi Gender di Tingkat Tapak dalam Program Perlindungan Hutan di Kawasan APL*. Jakarta: PKTL
2. Ditjen PKTL. (2020). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024*. Jakarta: PKTL
3. Ditjen PKTL. (2020). *Gender Action Kalfor Project 2020*. Jakarta: PKTL
4. Ditjen PKTL. (2021). *Road Map Pengarusutamaan Gender Ditjen PKTL Tahun 2021-2025*. Jakarta: PKTL
5. Ditjen PKTL. (2021). *Rencana Kerja Sub Pokja PUG Tahun 2020 Ditjen PKTL*. Jakarta: PKTL